



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 11
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kepala BNPB
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 6 Juni 2022.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 46 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 2 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala BNPB Beserta Jajaran

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda membahas “**Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2023 dan RKP Tahun 2023, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2021 dan Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022**” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima Pagu Indikatif BNPB Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp994.186.769.000,- (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang terdiri dari:

NO	UNIT KERJA ESELON	PAGU INDIKATIF 2023
<b>I.</b>	<b>PROGRAM KETAHANAN BENCANA</b>	<b>702.260.256.000</b>
1	DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI	15.350.000.000
2	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	337.502.756.000
3	DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT	264.550.000.000
4	DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	18.550.000.000
5	DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN	20.000.000.000
6	PUSDATINKOM	19.897.500.000
7	PUSDALOPS	26.410.000.000
<b>II.</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	<b>291.926.513.000</b>
8	PUSDIKLAT PB	8.685.842.000
9	SEKERTARIAT UTAMA	270.240.671.000
10	INSPEKTORAT UTAMA	13.000.000.000
<b>Grand Total</b>		<b>994.186.769.000</b>

Pembicaraan lebih lanjut mengenai Pagu Indikatif BNPB Tahun Anggaran 2023 akan dibahas dengan Eselon I BNPB.

2. Komisi VIII DPR RI mendorong BNPB untuk meningkatkan realisasi Anggaran Tahun 2022 yang baru terserap Rp802.528.233.521,- (*Delapan Ratus Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) atau 28,93 % dari Pagu Anggaran BNPB Tahun 2022 sebesar Rp2.773.589.341.000,- (*Dua Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi BNPB atas kesuksesan pelaksanaan kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 pada Tanggal 25-27 Mei 2022 di Bali dan 7 (Tujuh) Rekomendasi yang dihasilkan forum tersebut agar dapat diimplementasikan.

4. Komisi VIII DPR RI memahami usulan penambahan Anggaran BNPB Tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (*Satu Triliun Rupiah*) untuk keperluan:
  - a. Pembayaran honorarium PPK-BPP, Gaji P3K, dan Tunjangan Kinerja 80%
  - b. Honorarium PPNPN dan Pemeliharaan Gudang Jati Asih.
  - c. Pengelolaan organisasi BNPB untuk pembentukan Pusbin JF kebencanaan, Balai Besar dan restrukturisasi
  - d. Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, penanganan darurat, dan pascabencana (NSPK SPM)
  - e. Pengadaan peralatan Peringatan Dini teknologi modern, Dana Pendamping IDRIP dan Sosialisasi Mitigasi Bencana.
  - f. Penyediaan bantuan logistik, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kebencanaan, operasional verifikasi dan monev.
  - g. Penyediaan bantuan Pusdalops daerah, pemeliharaan sarpras, dan pengelolaan Call Center Pusdalops, Anggaran Rutin Lisensi, keamanan dan pemeliharaan alat perangkat TIK.
  - h. Pelaksanaan diklat fungsional dan kegiatan internasional Ardex pada Pusdiklat dan anggaran operasional pengelola keuangan.
  - i. Melaksanakan Program Sosialisasi Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di berbagai daerah melalui Desa Tangguh Bencana
5. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan program sosialisasi penyelenggaraan Program Penanggulangan Bencana di berbagai daerah dalam rangka kesiapsiagaan bencana untuk meminimalisir resiko masyarakat terdampak bencana.
  - b. Agar meningkatkan alokasi anggaran BNPB khususnya anggaran logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana guna memaksimalkan bantuan daerah terdampak bencana di Indonesia.
  - c. Melakukan perawatan terhadap berbagai peralatan BNPB di daerah guna menjamin ketersediaan dan kesiapannya saat terjadi bencana.

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.31 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**H.YANDRI SUSANTO, SPT.**